

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 159 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penguatan dan penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Tata Kelola Teknologi Informasi yang baik dalam rangka menuju *Good Governance*, serta untuk meningkatkan pengelolaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Ketua Bidang Proses Bisnis, Ketua Bidang Aplikasi dan Infrastruktur serta Anggota dari masing-masing bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan dan tanggung jawab:
1. menyiapkan bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
 2. merencanakan pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi unit terkait dan mengundang narasumber;
 3. mengorganisir dan memfasilitasi pertemuan pelaksanaan kegiatan;
 4. melakukan reviu hasil pelaksanaan kegiatan;
 5. mengawasi kerja dari pihak ketiga yang terlibat agar sejalan dengan rencana kegiatan; dan
 6. membuat dokumen dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh bagian terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 159 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	1. Kepala LKPP 2. Sekretaris Utama 3. Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 4. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM 6. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
2.	Ketua	:	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
3.	Ketua Bidang Proses Bisnis	:	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
4.	Anggota Bidang Proses Bisnis	:	1. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan 3. Yasip Khasani 4. Ichwan Nasution 5. Hardi Afriansyah 6. Januar Indra 7. Dwi Satrianto 8. Rusli Maryadi 9. Mudjisantosa 10. Muhammad Firdaus 11. Wildan Massani 12. Devi Yanuarita 13. Nicke Kusuma Devi 14. Disty Putri Ratna Indrasari 15. Umi Nurnaeni 16. Mirna Medita Endikasari

			17. Mustika Rosalina Putri 18. Widya Prima Sari Fultanegara
5.	Ketua Bidang Aplikasi dan Infrastruktur	:	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
6.	Anggota Bidang Aplikasi dan Infrastruktur		1. Patria Susantosa 2. Eko Rinaldo 3. Dodi Wahyugi 4. Selamat Budiharto 5. R. Adha Pamekas 6. M. Irvan Faradian 7. Andri Priyo Utomo 8. Yudi Prasetiawan 9. Nuraini Darmastuti 10. Aloysius Sigit Wicaksono 11. Dede Agustina Muhajirin 12. Hendarwan Suryandaru 13. Imelda Liliana 14. Rizky Dwi Raharjo 15. Bambang Saputra 16. Yudhianto Dwi Andika Putra 17. Doddy Pascal

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO